

STUDI KOMPARASI TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN MASALAH SOSIAL DI DESA SAWIT DAN DESA NON SAWIT KALIMANTAN TENGAH

Wilson Daud¹, Umami Suraya², Betrixia Barbara³

^{1,2,3} Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya

Email: wilsondaud@agb.upr.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dilakukan pada semua kabupaten/kota dan termasuk sebagai produk unggulan daerah Kalimantan Tengah prioritas kedua setelah karet, karena terdapat sepuluh dari 14 kabupaten/kota menempatkan kelapa sawit sebagai produk unggulan prioritas pertama sampai keempat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di desa sawit dan desa non sawit, (2) mengetahui masalah sosial yang terjadi di desa sawit dan desa non sawit, (3) menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran dengan masalah sosial yang terjadi di desa sawit dan desa non sawit di Kalimantan Tengah. Menggunakan metode penelitian campuran (*mixed research*), yaitu menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Sedangkan pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rumah tangga miskin dan pengangguran mutlak sebenarnya tidak terdapat di desa sawit dan non sawit. Adanya rumah tangga penerima BLT disebabkan karena adanya anjuran pemerintah daerah untuk menyediakan 20 % dari dana desa disalurkan sebagai BLT. Rumah tangga miskin sebagian besar adalah penduduk pendatang yang masih belum memiliki pekerjaan menetap, (2) masalah sosial yang terjadi di desa non sawit terdiri dari kemiskinan, dampak negatif modernisasi IT, pengangguran tersembunyi, pencurian dan perkelahian, sedangkan masalah sosial yang terjadi di desa sawit terdiri dari kemiskinan, dampak negatif modernisasi IT, pengangguran tersembunyi, kesenjangan hukum, peralihan penguasaan lahan, pencurian, dan disinyalir terdapat kelompok aliran sesat (3) keberadaan perkebunan kelapa sawit tidak secara langsung berpengaruh nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di desa sawit dan desa non sawit ditentukan oleh potensi wilayah sebagai variabel antara.

Keywords: pengangguran, kemiskinan, masalah sosial

PENDAHULUAN

Tahun 2011 pengembangan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dilakukan pada semua kabupaten/kota. Kelapa sawit ditempatkan sebagai produk unggulan daerah Kalimantan Tengah prioritas kedua setelah karet, karena terdapat sepuluh dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menempatkan kelapa sawit sebagai produk unggulan prioritas pertama sampai keempat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (2020), sesuai dengan luas

areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah secara keseluruhan seluas 1,5 juta hektar terdapat lima besar kabupaten yang menjadi pusat pengembangan kelapa sawit, yaitu (1) Kabupaten Kotawaringin Timur 27,26 %, (2) Kabupaten Seruyan 22,04%, (3) Kabupaten Kotawaringin Barat 13,00 %, (4) Kabupaten Lamandau 8,43 %, dan (5) Kabupaten Kapuas 7,02 %. Kelima kabupaten pusat pengembangan perkebunan kelapa sawit ini selanjutnya dalam studi ini disebutkan sebagai “Kabupaten Sawit”, sementara kabupaten lainnya disebutkan sebagai “Kabupaten Non Sawit”.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah (2022), tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah tahun 2019 – 2021, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Kalimantan Tengah, Tahun 2019 – 2021

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2019	2020	2021
A. Tingkat Kemiskinan:				
1.	Kotawaringin Barat	12,76	11,46	12,29
2.	Kotawaringin Timur	27,38	26,64	27,06
3.	Kapuas	18,23	18,17	19,45
4.	Lamandau	2,47	2,61	2,92
5.	Seruyan	14,66	14,53	15,07
Kalimantan Tengah		9,61	9,50	10,00
B. Tingkat Pengangguran:				
1.	Kotawaringin Barat	2,58	4,76	4,70
2.	Kotawaringin Timur	4,41	5,25	5,15
3.	Kapuas	5,18	4,98	4,91
4.	Lamandau	2,32	2,83	2,30
5.	Seruyan	4,45	4,30	4,25
Kalimantan Tengah		4,04	4,58	4,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (2021)

Menurut Soekanto (1990) bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada.

Menurut Usman (2012), salah satu masalah yang muncul dalam hubungan industrialisasi dengan lingkungan hidup adalah terjadinya benturan dengan masyarakat. Bibit benturan sosial antara pemerintah dan investor dengan masyarakat terutama sejak pembebasan lahan. Kawasan industri di negara berkembang biasanya menggunakan tanah milik negara, tetapi persediaan tanah negara tidak selamanya cukup, sehingga harus membeli tanah milik penduduk dengan ganti rugi yang seringkali kurang memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pemilik atau penguasa tanah.

Berdasarkan pandangan pakar sosial dan hubungan antara industrialisasi dengan lingkungan hidup tersebut dapat disimpulkan masalah sosial dapat terjadi sebagai akibat dari kemiskinan dan pengangguran sebagai bagian dari masalah ekonomi. Pada studi ini kajian tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran sekaligus mengkaji tentang kondisi masalah sosial pada desa sawit dan desa non sawit di Kalimantan Tengah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, masalah sosial yang terjadi di desa sawit dan desa non sawit di Kalimantan Tengah dan menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran dengan masalah sosial yang terjadi di Kalimantan Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode dan Waktu Penelitian

Metode dasar penelitian ini adalah penelitian campuran (*mixed research*), yaitu menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kuantitatif, karena

beberapa masalah dan tujuan penelitian merupakan penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif, sedangkan bagian lainnya merupakan penelitian kuantitatif murni. Penelitian dilaksanakan di desa sawit dan desa non sawit yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan.

Cara Penentuan Responden

Responden diperoleh dari masyarakat desa sawit dan desa non sawit yang ada di Kalimantan Tengah. Desa sawit adalah desa-desa yang berada di sekitar pusat pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik kebun perusahaan, kelapa sawit rakyat, dan pabrik pengolah perkebunan kelapa sawit, sedangkan desa non sawit adalah desa yang tidak berada di sekitar perkebunan kelapa sawit yang diusahakan secara komersil penuh. Jumlah responden masing-masing kelompok masyarakat ditentukan sesuai dengan persyaratan alat analisis kualitatif dan kuantitatif.

Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diperoleh melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok dan dokumentasi. Keseluruhan cara pengumpulan data tersebut dilakukan secara kolektif pada Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan masalah sosial yang terjadi di desa sawit dan desa non sawit dianalisis secara deskriptif kualitatif.
2. Hubungan antara tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dengan masalah sosial desa sawit dan desa non sawit dianalisis dengan regresi sederhana, dan jika terdapat kendala hasil analisis dilanjutkan dengan analisis jalur (*path analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama studi ini membandingkan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di desa sawit dan desa non sawit di Kalimantan Tengah dan keterkaitannya dengan masalah sosial yang terjadi. Responden penelitian terdapat di 15 desa sawit yang berada di Kabupaten Gunung Mas dan 15 desa non sawit yang berada di Kabupaten Pulang Pisau.

1. Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Desa Sawit dan Non Sawit di Kalimantan Tengah

a. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin dibanding dengan penduduk bukan miskin berdasarkan dikategorikan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Fakir miskin dalam UU 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup

(Nugroho, 1995).

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Menurut Harahap (2006), kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

b. Tingkat Pengangguran

Definisi pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, dan pengangguran terbuka adalah pengangguran sukarela, atau sengaja menganggur untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Seseorang baru dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya.

Pengangguran atau tuna karya

merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran.

Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara dan tidak hanya di Indonesia. Karena adanya pengangguran maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial. Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan kelesuan ekonomi, turunnya potensi diri, hilangnya keterampilan kerja, menurunnya pajak penghasilan serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun.

c. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kawasan yang tingkat kepadatan penduduk masih cukup rendah dan merupakan salah satu pusat pengembangan ekonomi nasional di bidang perkebunan dan pertanian tanaman pangan idealnya memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Kepadatan penduduk di Kalimantan Tengah tergolong masih cukup rendah (jarang), yaitu 18 jiwa/km², sedangkan secara nasional di tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 142 jiwa/km². Hal ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Tengah relatif rendah.

d. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Desa Sawit dan Desa Non Sawit di

Kalimantan Tengah

Jumlah responden sebanyak 30 desa, yaitu 15 desa sawit dan 15 desa non sawit. Desa sawit di Kabupaten Gunung Mas berada di Kecamatan Manuhing dan Manuhing Raya, sedangkan desa non sawit berada di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu di Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Pandih Batu. Namun demikian karena cukup

besarnya perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, di kecamatan yang dikategorikan sebagai desa non sawit di Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau masih terdapat masyarakatnya yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 – 2022 seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)		
		2020	2021	2022
1	Kotawaringin Barat	3.59	3.95	3.93
2	Kotawaringin Timur	5.62	5.91	5.95
3	Kapuas	5.04	5.35	5.52
4	Barito Selatan	4.45	4.62	4.88
5	Barito Utara	5.17	5.61	5.80
6	Sukamara	3.23	3.66	3.72
7	Lamandau	3.09	3.56	3.34
8	Seruyan	6.85	7.22	7.43
9	Katingan	4.79	5.25	5.50
10	Pulang Pisau	4.09	4.24	4.70
11	Gunung Mas	4.75	5.35	5.64
12	Barito Timur	6.09	6.38	6.59
13	Murung Raya	5.85	6.15	6.40
14	Palangka Raya	3.44	3.75	3.61
Kalimantan Tengah		4.82	5.16	5.28

Ada kebijakan pemerintah daerah bahwa 40 % dari dana desa disiapkan untuk membantu keluarga miskin, padahal sebenarnya secara riil tidak ada keluarga masyarakat yang dikategorikan miskin seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (pangan). Berdasarkan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas sama-sama merupakan Kabupaten non sawit, namun di Kabupaten Gunung Mas terdapat cukup banyak desa yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit.

Secara riil di lapangan, di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk semua kabupaten/kota di Kalimantan Tengah tidak terdapat penduduk angkatan kerja yang sama sekali tidak punya pekerjaan. Walaupun ada hanya digolongkan sebagai pengangguran tersembunyi, yaitu penduduk yang bekerja tidak penuh sesuai dengan jam

kerja yang tersedia. Ini menggambarkan bahwa jika seseorang angkatan kerja memang memiliki kemauan untuk bekerja, maka ia akan mendapatkan pekerjaan meskipun hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bersifat musiman, kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi oleh penduduk dari luar Kalimantan Tengah. Data di lapangan menunjukkan bahwa di desa sawit maupun desa non sawit tidak terdapat penduduk yang menganggur terbuka, kecuali hanya mereka yang tidak mau bekerja. Namun ada anggapan bahwa seseorang yang pekerjaannya tidak menetap adalah termasuk penganggur.

Di wilayah desa sawitpun banyak penduduk yang tidak mau bekerja di perkebunan kelapa sawit karena masih cukup banyak peluang kerja lain yang memberikan pendapatan lebih besar, contohnya pertambangan emas rakyat dan pertambangan sirkon (puya). Jenis-jenis

pertambahan rakyat tersebut meskipun “ilegal”, cukup memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat, meskipun tidak stabil. Bekerja pada perkebunan kelapa sawit sangat jarang ada masyarakat yang menjadi pekerja tetap, sehingga upah yang diterima hanya berkisar sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000/bulan.

e. Masalah Sosial di Desa Sawit dan Non Sawit di Kalimantan Tengah

Masalah sosial adalah suatu yang ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial adalah proses ketidakcocokan antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dapat dikatakan bahwa masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat,

Adanya berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat dapat membawa dampak bagi masyarakat itu sendiri. Adapun dampak dari adanya permasalahan sosial di masyarakat, antara lain meningkatnya kasus kriminalitas, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, adanya perpecahan kelompok, munculnya perilaku menyimpang, meningkatnya pengangguran, maraknya kasus perceraian, kenakalan remaja, di antaranya karena masalah keluarga dan faktor ekonomi.

Jenis-jenis permasalahan sosial yang sering terjadi dalam hubungan antara industri dengan masyarakat sekitarnya adalah penyakit menular, kemiskinan, pendidikan yang rendah, kualitas SDM yang rendah, modernisasi (dampak negatif penggunaan IT), pengangguran, kesenjangan hukum, korupsi, penguasaan lahan (tanah), pencurian, perkelahian, kekerasan seksual,

pertikaian, dan aliran sesat.

2. Hubungan Kausal Kemiskinan dan Pengangguran

Pengangguran amat erat kaitannya dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Logikanya sederhana, apabila seseorang tidak bekerja maka dia tidak akan memproduksi sehingga perhitungan output produksi dalam bagian PDB akan berkurang. Implikasinya secara makro, berdasarkan Okun's Law ada hubungan empiris dimana kenaikan 1 % dari angka pengangguran akan menurunkan nilai PDB maksimal 2 % (Amalia, 2012; Harlik dan Hardiani, 2017). Disamping hal tersebut pengangguran juga berpengaruh terhadap standar hidup masyarakat (Rustianto, 2018; Saifullah dan Gandasari, 2016), pengangguran juga mempengaruhi tekanan psikologis dan standar kehidupan masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang akan menderita batin karena hilangnya rasa percaya diri, dan tentunya akan semakin memperlebar kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Astari, et.al, 2019). Oleh karena itu permasalahan pengangguran, harus segera dicarikan jalan keluar, apabila hal tersebut dibiarkan, maka dapat menimbulkan tindakan kriminal dan anarkis sehingga akan mengancam ketenteraman kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Akhmad, 2015).

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau rumah tangga atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak dasarnya dalam mengembangkan kehidupan yang layak (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). Kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi; lebih dari itu juga meliputi tidak terpenuhinya hak-hak dasar seperti; kebutuhan pangan, pekerjaan, kesehatan, perumahan, pendidikan, air bersih, rasa aman, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Solikatun dan Demartoto, 2015).

3. Hubungan Antara Tingkat Kemiskinan dan Tingkat

Pengangguran Terhadap Masalah Sosial di Desa Sawit dan Non Sawit di Kalimantan Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata perkebunan kelapa sawit tidak berpengaruh langsung secara nyata terhadap penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Perkebunan kelapa sawit sebelum berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran ditentukan oleh potensi wilayah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kalimantan Tengah sebagian besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam perkebunan dan pengolahan yang membutuhkan pekerjaan intensif.
2. Masyarakat Kalimantan Tengah yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagian besar hanya pekerja kontrak, bukan pekerja tetap sehingga pendapatan yang diperoleh juga tidak besar.
3. Untuk memperoleh pendapatan yang memadai dalam usaha perkebunan kelapa sawit mandiri (swadaya) membutuhkan lahan yang cukup luas, yaitu minimal 4 hektar/ kepala keluarga.
4. Perputaran uang tunai yang diperoleh pada perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang cukup lama, misalnya menunggu minimal 4 tahun baru bisa panen untuk sawit mandiri, dan untuk pekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit dibutuhkan waktu 1 bulan baru dapat menerima pendapatan (gaji).
5. Wilayah yang berpotensi sebagai lokasi pertambangan emas dan pertanian tanaman pangan diperoleh pendapatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan bekerja di perkebunan kelapa sawit, pendapatan yang diperoleh kurang pasti.
6. Pada wilayah yang kurang memiliki potensi tambang emas rakyat dan pertanian tanaman pangan, bekerja di perkebunan kelapa sawit dan memberikan pendapatan yang memadai dan pendapatan tersebut lebih pasti.

Berdasarkan hubungan kausal antara kemiskinan dan pengangguran sebagaimana diungkapkan terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran berdampak kepada kemiskinan. Apabila pengangguran dan kemiskinan tidak dapat dicarikan jalan keluarnya akan berdampak kepada terjadinya masalah sosial yang mengancam kententeraman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahwa masalah sosial di desa sawit lebih banyak dibandingkan dengan di desa non sawit. Hal ini menggambarkan bahwa ada pengaruh keberadaan perkebunan kelapa sawit terhadap masalah sosial yang terjadi di Kalimantan Tengah. Menurut Soekanto (1990) masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Kemiskinan saat ini merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalaan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang di bawah dan di atasnya.

Kemiskinan bersifat multidimensi dan kemiskinan bersumber dari aneka kondisi (Hatmadji, 2013). Besarnya jumlah penduduk miskin akan berpotensi menciptakan permasalahan sosial yaitu menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial dan politik dan meningkatnya angka kriminalitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Rumah tangga miskin dan pengangguran mutlak sebenarnya tidak terdapat di desa sawit dan non sawit di Kalimantan Tengah. Adanya rumah tangga penerima BLT disebabkan karena adanya anjuran pemerintah daerah untuk menyediakan 20 % dari dana desa disalurkan sebagai BLT. Rumah tangga miskin sebagian besar adalah penduduk pendatang yang masih belum memiliki pekerjaan menetap, sedangkan penduduk yang menganggur hanya sebagai pengangguran tersembunyi.
2. Masalah sosial yang terjadi di desa non sawit terdiri dari kemiskinan, dampak negatif modernisasi IT, pengangguran tersembunyi, pencurian dan perkelahian, sedangkan masalah sosial yang terjadi di desa sawit terdiri dari kemiskinan, dampak negatif modernisasi IT, pengangguran tersembunyi, kesenjangan hukum, peralihan penguasaan lahan, pencurian, dan disinyalir terdapat kelompok aliran sesat.
3. Keberadaan perkebunan kelapa sawit tidak secara langsung berpengaruh nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di desa sawit dan desa non sawit ditentukan oleh potensi wilayah sebagai variabel antara.

Saran dan Rekomendasi

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya pengentasan kemiskinan dan penanggulan tingkat pengangguran di desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab perusahaan yang berada di wilayahnya melalui kegiatan *Corporate Social*

Responsibility yang ditujukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan potensinya dan dilakukan pendampingan yang berkelanjutan.

2. GAPKI Kalteng hendaknya memfasilitasi secara aktif kegiatan riset dan pengabdian masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit, baik yang menyangkut dampak positif maupun dampak negatif perkebunan kelapa sawit. Dampak negatif perkebunan kelapa sawit sebaiknya tidak hanya ditemukan oleh pihak luar, tetapi dapat ditemukan dan diinformasikan langsung oleh pihak perkebunan kelapa sawit kepada pihak luar agar dapat disusun kebijakan strategis demi tercapainya slogan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, F. 2015. *Pengaruh Supply Chain Management Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan Retail di Sleman*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII
- Amalia, F. 2012. *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)*. Periode 2001 – 2010
- Astari, L. D., Nasoetion A., Dwiriani C. M. 2019. *Hubungan Karakteristik Keluarga, Pola Pengasuhan dan Kejadian Stunting Anak Usia 6 – 12 Bulan*. *Media Gizi & Keluarga*. 29(2) : 40 -46
- Bappenas; UNICEF. 2017. *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia*. Jakarta: Bappenas dan UNICEF.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 2021. *Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020*.

- Palangka Raya
- Harlik, A. dan Hardiani. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1, No. 2
- Harahap, S. A. 2006. *Analisis Masalah Kemiskinan dan Tingkat Pendapatan Nelayan Tradisional di Kelurahan Indah, Kecamatan Medan Labuhan Kota. Medan*
- Hatmadji, S. H. 2013. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nugroho, H. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Rustianto, B. 2018. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Saifullah dan T. R. Gandasari. 2016. *Pengaruh Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten*. Vol.2, No.2. 6 April 2020.
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Solikatun, Kartono, D. T. dan Demartoto, A. 2015. *Perilaku Konsumsi Kopi Sebagai Budaya Masyarakat Konsumsi: Studi Fenomenologi Pada Peminum Kopi di Kedai Kopi Kota Semarang*. J. Analisa Sosiologi. 4(1). Hal 60-74. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17410/13908>
- Suryawati, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. JMPK Volume 8 (3)
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 *Tentang Penjamin Simpanan*
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420
- Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83
- Usman, S. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Cetakan VII. Pustaka Pelajar, Yogyakarta